

PANCASILA DALAM PERSPEKTIF 50 TAHUN KEMERDEKAAN R.I.

MENYONGSONG PJP II 25 TAHUN MENDATANG

Koento Wibisono Siswomihardjo
Ketua Pusat Studi Pancasila Universitas Gadjah Mada

Pancasila harus membongkar realitas sosial yang ada secara de facto, yaitu kemiskinan dan keterbelakangan yang diwariskan oleh kedua sistem penjajahan untuk diganti dengan masyarakat ideal, yaitu masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera lahir dan batin.

Pancasila sebagai Dasar Negara

Bangsa dan negara Indonesia yang lahir kembali pada tanggal 17 Agustus 1945 melalui proklamasi kemerdekaannya merupakan suatu bangsa dan negara yang terdiri atas ratusan suku yang mendiami wilayah luas dari Sabang sampai Merauke, dan ratusan suku itu hidup di atas ratusan-belas kepulauan. Masing-masing memiliki bahasa dan dialeknya sendiri-sendiri, berbeda agama atau kepercayaannya, adat-istiadat serta kebudayaannya.

Dilatarbelakangi masa penjajahan selama 3,5 abad oleh kolonialisme Belanda dan 3,5 tahun oleh militerisme Jepang, maka untuk mempersatukan kembali suku-suku tadi menjadi satu kesatuan bangsa dalam wadah satu kesatuan negara, ditetapkanlah Pancasila sebagai dasar negara, yang unsur-unsurnya adalah nilai-nilai budaya yang telah tumbuh dan berkembang di bumi Indonesia sendiri.

Sebagai dasar negara Pancasila dicantumkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 secara utuh-komprehensif menjadi satu pengertian filsafati, yang kemudian disyahkan pada tanggal 18 Agustus 1945.

Berbeda dengan liberalisme/kapitalisme dan sosialisme / komunisme yang lahir dari suatu realitas sosial sebagai implikasi revolusi Industri di abad ke-18 di Eropa

Barat, maka Pancasila justru harus membongkar realitas sosial yang ada secara de facto, yaitu kemiskinan dan keterbelakangan yang diwariskan oleh kedua sistem penjajahan untuk diganti dengan masyarakat ideal, yaitu masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera lahir dan batin.

Perkembangan Pancasila sebagai Dasar Negara

Apabila kita melacak kembali kelahiran dan perkembangan Pancasila semenjak disiapkan untuk diusulkan sebagai dasar negara hingga disyahrkannya pada tanggal 18 Agustus 1945, kesemuanya itu berlangsung dalam forum politik (yaitu Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia); artinya bukan dalam forum akademis-ilmiah, sehingga tesis-tesis politis pula yang terutama dipergunakan sebagai dasar argumentasi dan kontra-argumentasinya.

Di dalam forum politik itulah dikumandangkan himbauan-himbau politik untuk mencapai kesepakatan-kesepakatan politik yang sangat mendasar yang dibutuhkan bagi dasar dan arah kehidupan kemerdekaan menuju masa depan yang menjadi idaman bersama. Hal itu jelas menampak dalam perdebatan yang utamanya berlangsung pada saat membicarakan Piagam Jakarta 22 Juni 1945 dan mencapai klimaksnya pada tanggal 18 Agustus 1945, saat disepakatinya penghapusan "tujuh kata-kata" dalam merumuskan sila pertama Pancasila.

Semenjak ditetapkannya menjadi dasar negara, perkembangan Pancasila berlangsung melalui tahap-tahap sebagai berikut:

Pertama: Tahun 1945-1968 adalah tahap "politik" untuk mengembangkan nation building. Semangat persatuan dan kesatuan dijadikan tema utama demi survival suatu bangsa yang baru lahir (kembali), terutama untuk menanggulangi berbagai ancaman yang datang dari dalam (seperti: DI, TII, PRRI, PERMESTA, Peristiwa Madiun, dan G30S/PKI) dan dari luar (seperti: gerakan aksi militer Belanda, pemecahan negara kesatuan menjadi negara federal, dan berbagai

gerakan subversi perebutan pengaruh dari blok Barat dan Timur). Di dalam tahap dengan atmosfir "politik sebagai panglima", di mana Pancasila ditafsirkan dan diterapkan terutama pada "aksentuasi politisnya" patut dicatat adanya upaya untuk memugar Pancasila sebagai suatu sistem ilmiah-filsafati yang dirintis oleh Prof. Notonagoro semenjak tahun 50-an, diikuti oleh Prof. Drijarkara, sebagai justifikasi atau *raison d'être* - bahwasanya bagi bangsa Indonesia Pancasila bukan sekedar alternatif, melainkan menjadi imperatif, suatu konsensus filsafati, bukan sekedar konsensus politis, yang mengamanatkan "komitmen transenden" sebagai tali-pengikat persatuan dan kesatuan lahir dan batin guna melestarikan kehidupan bangsa sesuai dengan lambang "Bhinneka Tunggal Ika".

Diuraikan oleh Notonagoro pada tahun 1955 bahwa Pancasila memenuhi syarat ilmiah untuk menjadi Staatsfundamental-Norm yang tidak dapat diubah oleh siapa pun (termasuk MPR) sekiranya kita menyatakan bahwa negara yang kita miliki ini adalah negara Proklamasi 17 Agustus 1945. Tesis tersebut resonansinya tercermin di dalam Ketetapan M.P.R.S. Nomor XX/MPRS/1966, yang jiwanya tetap menyemangati setiap sidang M.P.R. hingga sekarang ini.

Kedua: Tahun 1969-1994 adalah tahap "pembangunan ekonomi" sebagai tindak lanjut untuk mengisi kemerdekaan dalam kerangka Pembangunan Jangka Panjang I (PJP I). Ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dikembangkan sebagai sarana dan wahana untuk dikuasai menuju masyarakat modern melalui proses industrialisasi dengan segala konsekuensinya.

Tantangan yang dihadapi dalam tahap kedua ini tidak lagi hanya bahaya

laten komunisme, melainkan juga kapitalisme yang telah "berjaya" dalam persaingannya dengan paham komunisme.

Kita melihat bahwa pada tahun 1989 komunisme telah bangkrut dalam waktu yang relatif singkat, tidak karena lawan ideologisnya yaitu kapitalisme, melainkan justru karena faktor-faktor intern yang berkembang dalam kubunya sendiri. Rezim negara-negara satelit di Eropa Timur satu demi satu digu-lingkan oleh gerakan pro-demokrasi di negaranya masing-masing, disusul dengan ambruknya kekuasaan mutlak Sentral Komite Partai Komunis Uni Sovyet pada tahun 1990. Krisis ekonomi adalah jalarannya, namun sebab utama yang sangat mendasar adalah dirampasnya harkat dan martabat manusia sekaligus hak-hak asasinya, sehingga setapak demi setapak kubu komunisme telah membunuh dirinya sendiri. Kalau pun kini masih ada negara yang menerapkan ideologi komunisme seperti: Vietnam, RRC, Khmer Merah, Korea Utara, Kuba, hal tersebut lebih ditentukan oleh masalah-masalah historis-intern di dalam negerinya masing-masing. Sulit untuk dipercayai bahwa paham komunisme masih akan mampu mewujudkan masyarakat modern tanpa kelas sebagaimana doktrin yang mereka ajarkan.

Perang dingin semenjak itu telah berakhir. Apa yang kemudian menjadi tantangan bagi Pancasila adalah hadirnya raksasa-taksasa kapitalisme Amerika Serikat yang berwatak Anglo-Sakson dengan ambisinya untuk menjadi "penguasa tunggal" dunia, di damping kapitalisme Eropa Barat dengan "roh" sosial-demokrasinya yang menjalar ke Eropa Timur, dan kapitalisme Jepang dengan model guided industrial di bawah pengayoman karisma kaisar yang bangun sebagai macan Asia dengan diikuti oleh Singapura, RRC, Taiwan, Hongkong dan

Korea Selatan, dengan semangat Neo-Confusianismenya sebagai impetus-budaya-religius yang juga ikut mendorong semakin maraknya paham liberalisme/kapitalisme ke berbagai penjuru dunia.

Gelombang globalisasi yang implisit membawa peru-bahan secara cepat dan mendasar kini sedang melanda ke semua arah, merupakan situasi yang kondusif bagi berkembangnya kapitalisme melalui hukum pasar untuk menguasai ekonomi dunia oleh ketiga raksasa kapitalisme Amerika Serikat, Eropa Barat dan Jepang.

Gelombang aneksasinya kapitalisme dengan corak multi dan trans-nasional di bidang IPTEK, politik, sosial-ekonomi, militer, disertai kerangka budaya sebagai sarana pendukungnya, merupakan tantangan - bahkan ancaman! - sebagai salah satu fenomena yang muncul dalam tahap pembangunan ekonomi di mana asas-asas Pancasila harus kita tumbuh-kembangkan.

Ketiga: Tahun 1994-2019 adalah tahap "peningkatan kualitas" di segala bidang, terutama peningkatan kualitas manusia sebagai (subjek) manusia, di samping sebagai sumber daya yang cenderung menjadikan manusia sebagai instrumen pembangunan, sambil meningkatkan pembangunan ekonomi dengan segala konsekuensi dan implikasinya.

Timbulnya distorsi dalam berbagai sektor kehidupan merupakan tantangan sejauh mana Orde Baru masih konsisten untuk melaksanakan Pancasila secara murni dan konsekuen dalam merampungkan tugas PJP II menuju hari depan 25 tahun yang akan datang, sebagai hari esok yang lebih baik daripada hari ini.

Fenomena Perubahan

Berbeda dengan situasi 50 tahun yang lalu, dunia masa kini sedang dikuasai oleh "mitos" yaitu IPTEK diyakini sebagai sarana mutlak yang harus dijadikan wahana menuju masyarakat modern melalui proses industrialisasi. Merupakan suatu kenyataan bahwa IPTEK berkat temuan-temuannya secara spektakuler telah menjadi sesuatu yang substantif dalam kehidupan umat manusia masa kini. IPTEK bukan lagi hanya sekedar sarana. Dengan kedudukannya sebagai sesuatu yang substantif tadi, IPTEK telah menyentuh semua segi dan sendi kehidupan secara ekstensif, yang pada gilirannya IPTEK merombak budaya manusia secara intensif.

Fenomena perubahan itu terasa dan terlihat pada masyarakat kita yang sedang mengalami masa transisi secara simultan yaitu:

1. Transisinya masyarakat dengan budaya agraris-tradisional menuju budaya industri-modern. Bukan lagi kekuatan-kekuatan kosmis dengan kemukjijatannya itu, yang diyakini sebagai faktor penentu dalam kehidupan, melainkan sang akal dengan daya penalaran yang canggih, yang dijadikan sarana untuk meramal dan menguasai masa depan. Persepsi mengenai ruang dan waktu, etos kerja, ajaran-ajaran etik dan moral yang semula dijadikan panutan, setapak demi setapak bergerak dan bergeser untuk mencari format yang baru agar dapat berfungsi dalam melayani kehidupan yang berubah.

2. Transisinya masyarakat dengan budaya etnis-kadaerahan menuju masyarakat dengan budaya nasional-kebangsaan. "Puncak-puncak budaya daerah" sebagaimana disebutkan dalam penjelasan pasal 32 UUD 1945 sedang mencair secara konvergen menuju satu kesatuan pranata dengan "kendali" Wawasan Nusantara demi tegak-kokohnya

negara kebangsaan (nation-state) dari Sabang sampai Merauke. Penataan sistem dan struktur birokrasi, pendidikan, pembentukan institusi-institusi sosial, penanaman nilai-nilai moral melalui penataran P-4 merupakan daya upaya serius untuk membina jati diri kita sebagai suatu kesatuan bangsa.

3. Transisinya masyarakat dengan budaya nasional-kebangsaan menuju masyarakat dengan budaya global-mondial. Visi, persepsi dan orientasi mengenai nilai-nilai universal seperti hak-hak asasi, demokrasi, keterbukaan, kebebasan, keadilan dan lain sebagainya - dilepaskan dari ikatan fanatisme primordial agama, kesukuan, atau pun kebangsaan, menuju satu kesatuan kosmopolitisme, meskipun di sana-sini tetap mentoleransi adanya pluralisme dalam berbagai aspek kehidupan sebagaimana digerakkan oleh faham post-modernisme.

Mengenai konfigurasi semacam ini, Mangunwijaya menggambarkan bagaimana budaya global itu didukung manusia massal, sebagaimana audience yang sedang diasikkan oleh cerita menarik dilayar putih, masing-masing duduk tenang, sepi, teratur, di kursinya masing-masing, namun masing-masing juga sibuk dengan gagasannya sendiri pula untuk menanggapi apa yang dilihat di layar putih.

Reaksi-reaksi yang Timbul untuk Menghadapi Masa Transisi

Dalam suasana transisional semacam itulah muncul reaksi, di satu pihak apa yang disebut budaya sandingan (sub culture) sebagai upaya untuk mengimprovisasikan nilai-nilai lama agar tetap efektif berfungsi dalam menyongsong perubahan zaman, sedang di pihak lain muncul budaya tandingan (counter culture) sebagai "protes" terhadap arus perubahan

yang dirasakan sebagai penyebab keadaan yang menjadi serba tidak menentu.

Kehidupan cenderung menggunakan standard ganda. Yang baik dan yang buruk, yang halal dan yang haram, yang susila dan yang maksiat, muncul berdampingan sebagai kenyataan sehari-hari. Ajaran moral para pujangga menjadi benar dan tidak benar, dan dipraktikkan secara sepotong-sepotong sepanjang dapat dijadikan alasan pembenaran untuk mencapai dan mempertahankan sesuatu interest, dengan dalih "modernitas" sebagai motif pemaafannya.

Dalam kondisi semacam itulah kini mental dan kepribadian kita masing-masing sedang diuji, dan hanya "Het zijn sterke benen die de weelde kunnen dragen!" kata pepatah Belanda.

Di samping itu guna mengantisipasi fenomena perubahan tadi muncul pula beberapa sikap atau pendapat sebagai alternatif.

1. Sebagaimana sering dikemukakan oleh almarhum Sutan Takdir Alisyahbana yang menyatakan bahwa kita harus merebut budaya Barat, yaitu budaya yang telah mengantarkan dunia Barat menjadi pemilik dan penguasa IPTEK. Dunia masa depan akan semakin dikuasai oleh IPTEK. Budaya Barat adalah budaya yang mengandung unsur-unsur kebebasan, individu- alisme, rasionalisme, optimisme, kreatif-inivatof, dan eksploratif, sebagai warisan dari zaman Renaissance yang dirintis semenjak abad ke-15. Dengan budaya inilah maka masyarakat Barat berkembang dengan "tiada hari tanpa temuan-temuan baru".

2. Sementara fihak menyatakan bahwa tidak ada sesuatu design manapun yang akan dapat merekayasa masa depan. Memang masa depan akan semakin dikuasai oleh IPTEK, akan tetapi IPTEK itu sendiri sulit untuk diramalkan arah

perkembangannya, sehingga sulit bagi kita untuk meramalkan apakah masa depan akan "diselamatkan oleh IPTEK" atau justru sebaliknya.

3. Kita tegaskan komitmen kita kepada Pancasila sebagaimana kita selalu mencanangkannya bahwa "pembangunan nasional kita adalah pembangunan manusia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya", sehingga masa transisi dapat kita arahkan menuju tercapainya cita-cita kita sebagaimana telah ditegaskan di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Demi dan atas nama pembangunan sebagai pengamalan Pancasila secara "murni dan konsekuen" sebagaimana telah dicetuskan di awal kelahiran orde baru, maka yang kita dambakan adalah adanya suatu generasi penerus, manusia-manusia yang sadar dan terdidik, yang merasa terpanggil untuk dengan jiwa dan semangat Pancasila berkiprah sebagai aktor-aktor pembangunan menuju masa depan yang lebih baik daripada masa kini.

Regenerasi merupakan masalah nasional yang teramat penting dan mendasar, sehingga terlalu riskan untuk dita-ngani hanya secara politis ataupun ekonomis saja. Dibutuhkan suatu strategi budaya untuk mengantisipasi masalah-masalah kehidupan dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang di masa depan akan dihadapkan dengan tantangan-tantangan yang semakin kompleks, namun masa depan sekaligus juga merupakan peluang untuk berkarya.

Pendidikan dalam arti luas, baik formal, non-formal, maupun informal sebagai sarana strategis pembangunan mempunyai peranan yang teramat penting, terutama untuk melahirkan generasi penerus yang sadar dan terdidik, mempunyai idealisme dan komitmen untuk mewujudkan cita-cita Proklamasi 17

Agustus 1945, sebagaimana juga telah diperjuangkan oleh para pahlawan bangsa yang telah mendahului kita. Bersamaan dengan itu perlu diiringi pula dengan contoh dan suri-tauladan para tokoh yang dijadikan panutan oleh masyarakat, yang dengan sikap, pendapat dan perbuatan mereka, agar tersedia situasi yang kondusif bagi penyiapan tampilnya generasi penerus untuk melanjutkan pembangunan dalam kerangka pelaksanaan PJP II.

Hakekat pendidikan menyangkut dua aspek, pertama yaitu memberi bekal pengetahuan ilmiah, ketrampilan, pengalaman intelektual, etos kerja dan sopan santun akademis; "it is a matter of having". Untuk itu memang untuk sebagian besar kita masih harus menimba pengetahuan dan pengalaman dunia Barat yang memang telah jauh lebih maju dalam menguasai ilmu pengetahuan. Aspek kedua yaitu membentuk jatidiri atau kepribadian; "it is a matter of being".

Aspek kedua ini tidak kalah pentingnya, bahkan mungkin lebih penting dari aspek pertama. Untuk itu jangan sampai dan tidak boleh kita mentransfer nilai-nilai dari luar. Penampil-an manusia-manusia Amerika atau pun Jerman sebagai sosok manusia modern tidak sama. Masing-masing memiliki ciri kepribadiannya sendiri-sendiri. Jepang misalnya, berkat kemampuannya dalam memiliki dan menerapkan konsep pembangunan yang konsisten dan relevan dengan pembentukan watak dan budayanya telah berhasil menampilkan generasi penerus pasca perang dunia ke-2 yang mampu menunjukkan keunggulan kompetitif dalam memasuki masa kini dan masa depan.

Kita tidak ingin menjadi manusia Jepang atau Amerika, ataupun manusia Jerman. Yang kita inginkan ialah agar kita tetap menjadi "diri kita sendiri". Menjadi

bangsa yang besar dan terhormat di kalangan bangsa-bangsa lain, berkat kemampuan dan keberhasilan kita dalam membangun masyarakat, yaitu masyarakat yang ber-Pancasila.

Wasana Kita

Memang sejarah kehidupan kemerdekaan kita dengan Pancasila sebagai dasar negara belum berlangsung dalam hitungan abad. Namun demikian sudah terlalu lama untuk membiarkan adanya penyimpangan-penyimpangan, sehingga penghayatan dan pengamalan Pancasila menjadi terdistorsi dan pada gilirannya menjadi counter-productive, bertentangan dengan nilai-nilai dan asas-asas yang tersimpul di dalam Pancasila itu sendiri.

Peringatan 50 tahun usia kemerdekaan kita merupakan momentum yang tepat untuk melakukan mawas diri, melakukan intro-dan-retrospeksi dalam melanjutkan pengabdian kita sebagai pernyataan kesetiaan kita kepada para pahlawan yang dengan rela telah mengorbankan jiwa-raganya dalam mempertahankan kemerdekaan kita.

Suatu common interest harus kita tentukan agar pengelolaan PUSAT STUDI PANCASILA UNIVERSITAS GADJAH MADA dapat berkembang secara efektif dan dirasakan kemanfaatannya oleh masyarakat ilmiah pada khususnya, bangsa Indonesia pada umumnya.

Bandung, 17 Juni 1995

DAFTAR PUSTAKA

Abdulgani, Ruslan, *Kapitalisme Dalam Masa Pasca Perang Di- ngin; Suatu Kajian Dari Perspektif Pancasila*, Pidato Pengarahan Selaku Ketua

Tim P-7 Dalam Seminar Tim P-7,
tgl. 6-7 April 1993 di Jakarta.

Drikarya, N., Kumpulan Karangan,
Penerbit Kanisius, Yogyakarta, tt.

M P R RI, Ketetapan-Ketetapan Majelis
Permusyawaratan Rakyat Republik
Indonesia Tahun 1993, Sekeretariat
Jenderal Majelis Permusyawaratan
Rakyat Republik Indonesia, Jakarta,
1993.

Notonagoro, Pemboekaan Oendang-
Oendang Dasar 1945, Pokok Kaidah
Fundamentil Negara Republik
Indonesia, Penerbitan Mengenai
Pantjasila Nomer Kedua,
Universitas Gadjah Mada,
Yogyakarta, tt.

Sastrapratedja, M., et.al, (eds), Menguak
Mitos-Mitos Pemba-ngunan,
Gramedia, Jakarta, 1986.

Schipper, F. et.al, (eds), Ontwikkeling,
Rationaliteit, en Cultuur, Kok
Agora, Kempen, 1986.

Siswomihardjo, Koento Wibisono,
Pengembangan Filsafat Hukum
Nasional, Makalah disajikan pada
Forum Seminar Nasional
Pengembangan Hukum Nasional,
tgl. 25-29 Juli 1994 di Jakarta.

Suseno, Franz Magnis, Berfilsafat Dari
Konteks, Gramedia, Jakarta, 1991.

van Peursen, et.al., Toward A New
Concept of Development, Penelitian
tidak dipublikasikan, Leiden, 1982.

William, H.F., Japan Today, People,
Places, Power, Sixth Printing,
charles E. Tuttle Co., Tokyo, 1987.